

CATATAN DPR TERHADAP KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL 2024

Nidya Waras Sayekti*

Abstrak

Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) telah disampaikan pemerintah dan mendapat persetujuan DPR untuk dibahas lebih lanjut dalam RAPBN 2024. Usulan tersebut mendapat berbagai penilaian dari kalangan yang berbeda. Tulisan ini menganalisis KEM PPKF yang telah disetujui DPR sebagai dasar penyusunan RAPBN 2024 dalam upaya penguatan transformasi ekonomi. Dalam KEM PPKF, pemerintah mengusulkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Guna mencapai target tersebut, pemerintah harus menetapkan strategi dengan mempertimbangkan pergantian kepemimpinan di tahun depan. Upaya yang dapat dilakukan yakni meningkatkan rasio perpajakan dan membelanjakan anggaran dengan bijak dan produktif sehingga mampu mengatasi defisit anggaran tanpa mengandalkan utang. RAPBN 2024 diharapkan tetap mengacu kepada prioritas nasional untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Badan Anggaran DPR perlu mendorong pemerintah untuk memerhatikan dan mengakomodir catatan yang telah diberikan sembilan fraksi. Komisi I - XI DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap realisasi APBN 2023 sehingga memungkinkan pencapaian target RAPBN 2024.

Pendahuluan

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk tahun 2024 telah disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat, 19 Mei 2023. Persetujuan DPR terhadap KEM PPKF penting bagi pemerintah untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024. RAPBN Tahun 2024 nantinya akan dibahas oleh DPR melalui sebelas komisinya bersama mitra kerjanya (pemerintah). Dalam KEM PPKF, pemerintah mengusulkan pertumbuhan positif kebijakan ekonomi makro dan fiskal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. KEM PPKF yang



PUSLIT BKD



9 772088 235001

* Analisis Legislatif Ahli Madya bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan (Ekkuinbang).
Email. nidya.ws@dpr.go.id

diajukan pemerintah mendapat berbagai penilaian dari kalangan yang berbeda.

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai KEM PPKF RAPBN 2024 yang diajukan pemerintah ke DPR terlalu optimis dan kurang realistis. Tekanan eksternal masih terlihat dari tingginya ketidakpastian negara-negara mitra dagang tradisional Indonesia, utamanya Tiongkok yang berdampak pada kondisi industri manufaktur yang akan melemah karena menurunnya permintaan ekspor. Efek tingkat suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) terhadap bunga utang, pinjaman perbankan, hingga konsumsi rumah tangga juga dapat memengaruhi prospek perekonomian Indonesia tahun 2024. Pada tahun pemilu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi cenderung melambat. Investor di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, industri manufaktur akan melihat dulu arah kebijakan ekonomi dan pembangunan hingga pemilu selesai. Dampak fenomena El Nino juga akan berpengaruh pada cadangan pangan dan pengendalian inflasi pada awal tahun. Penerimaan perpajakan akan menekan angka defisit anggaran sehingga menekan jumlah utang (Media Indonesia, 22 Mei 2023).

Sembilan fraksi di DPR menyampaikan persetujuan dan pandangannya atas usulan KEM PPKF yang disampaikan pemerintah tersebut. Kendati menyetujui, kesembilan fraksi turut memberikan catatan kepada pemerintah guna menjadi pertimbangan di dalam pembahasan penyusunan RAPBN 2024. Catatan tersebut disampaikan

pada Rapat Paripurna ke-24 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 - 2023, tanggal 23 Mei 2023. Tulisan ini menganalisis KEM PPKF yang telah disetujui DPR sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun 2024 dalam upaya penguatan transformasi ekonomi.

Catatan Bagi Pemerintah

Pemerintah mengusulkan kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun 2024 sebagai berikut (Tabel 1).

Kesembilan fraksi di DPR memberikan pandangan dan catatannya terhadap KEM PPKF yang diajukan pemerintah, yaitu: Fraksi PDIP meminta agar asumsi-asumsi yang disusun pemerintah disertai upaya dan kebijakan yang dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan peningkatan produktivitas sektoral (Media Indonesia, 24 Mei 2023); Fraksi Golkar, meminta pemerintah perlu terus melanjutkan dan memperkuat sejumlah agenda reformasi, seperti reformasi struktural, reformasi birokrasi, reformasi perpajakan, serta reformasi sektor keuangan (dpr.go.id, 23 Mei 2023); Fraksi Gerindra mendorong pemerintah lebih serius melakukan revitalisasi industri pengolahan dan perkembangan sektor lainnya melalui modernisasi pertanian (dpr.go.id, 23 Mei 2023); Fraksi Nasdem mendorong pemerintah untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga mencapai pertumbuhan ekonomi 6% bukan hanya 5,7% sehingga mampu mengangkat Indonesia dari *middle income trap* sebelum tahun 2045 (dpr.go.id, 23 Mei 2023); Fraksi PKB memberikan catatan bahwa

Tabel 1. Usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Tahun 2024

Kerangka/Kebijakan	Nilai
Kerangka Ekonomi Makro:	
Pertumbuhan ekonomi	5,3% - 5,7%
Tingkat inflasi	1,5% - 3,5%
Nilai tukar rupiah	Rp14.700 - Rp15.300 per US\$
Tingkat suku bunga SBN 10 tahun	6,49% - 6,91%
Harga minyak mentah Indonesia (ICP)	US\$75 - US\$85 per barel
Lifting minyak bumi	597 ribu - 652 ribu per barel per hari
Lifting gas	999 ribu - 1.054 juta barel setara minyak per hari
Kebijakan Fiskal:	
Defisit APBN 2024	2,16% - 2,64% PDB
Pendapatan negara	11,81% - 12,38% dari PDB
Belanja Negara	13,9% - 15,01% dari PDB
Rasio Utang	38,07% - 38,97% dari PDB
Pendapatan Negara dari PDB	11,81% - 12,38%
Belanja Negara dari PDB	13,97% - 15,01%
Defisit APBN dari PDB	2,16% - 2,64%
Rasio Utang dari PDB	38,07% - 38,97%
Tingkat Pengangguran Terbuka	5% - 5,7%
Angka Kemiskinan	6,5% - 7,5%
Rasio Gini	0,374 - 0,377
Indeks Pembangunan Manusia	73,99 - 74,02
Nilai Tukar Petani	105 - 108
Nilai Tukar Nelayan	107 - 110

Sumber: Media Indonesia, 22 Mei 2023.

peningkatan belanja infrastruktur belum meningkatkan indeks daya saing dan kontribusi industri dalam PDB. Selain itu, peta jalan pembangunan ekonomi Indonesia, baik antar kementerian maupun lembaga negara belum terintegrasi dengan baik (antaranews.com, 23 Mei 2023); Fraksi PPP menilai KEM PPKF yang diusulkan pemerintah cukup ambisius di tengah ketidakpastian global dan politik dalam negeri akibat pemilu serta pergantian kepemimpinan nasional (Kompas, 24 Mei 2023); Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah menunda pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tidak menambah beban anggaran (Kompas, 24 Mei 2023); dan Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk melaksanakan evaluasi secara komprehensif terhadap kebijakan yang sudah dan sedang berjalan agar memberikan pijakan yang kokoh serta mampu mendorong perbaikan

ekonomi secara menyeluruh (daulat.co.id, 24 Mei 2023).

Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, menilai KEM PPKF untuk RAPBN 2024 yang disusun pemerintah berpeluang untuk direalisasikan apabila pemerintah fokus dan bekerja ekstra. Pemerintah harus terus mengupayakan investasi agar memberikan kontribusi yang lebih besar karena peran ekspor akan melandai akibat harga-harga komoditas mulai stabil. Asosiasi of South East Asian Nations (ASEAN) yang saat ini menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menarik investasi di Indonesia. Hal lain yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yakni pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun depan. Secara historis, pemilu mendorong peningkatan uang beredar dan konsumsi (Media Indonesia, 22 Mei 2023).

Berdasarkan berbagai catatan yang diberikan DPR terhadap kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal,

pemerintah perlu antisipatif dengan menyusun strategi agar target ekonomi dan fiskal tahun 2024 dapat tercapai. Hal ini dikarenakan tahun depan merupakan tahun politik dan pergantian pimpinan sehingga menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Evaluasi atas realisasi APBN 2023 dan pencapaian target indikator ekonomi dan kebijakan fiskal tahun 2023 juga perlu dilakukan agar RAPBN 2024 lebih realistis.

Menanggapi catatan DPR terhadap KEM PPKF, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa usulan pemerintah tersebut adalah sesuatu yang realistis. Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui reformasi di bidang APBN secara holistik dengan peningkatan pendapatan negara, memperbaiki belanja negara, dan mengelola pembiayaan secara *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan (dpr.go.id, 30 Mei 2023). Pemerintah akan memastikan belanja negara 2024 diarahkan untuk mencapai target prioritas nasional. Pemerintah akan terus mendorong penguatan belanja yang lebih berkualitas sebagai komitmen bersama. Guna menopang kebutuhan belanja 2024, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak 2024 yang mendapat dukungan dari pelaksanaan pemilu, khususnya dari pajak pertambahan nilai (Kompas, 24 Mei 2023).

Penutup

KEM PPKF yang disampaikan pemerintah telah disetujui DPR dengan berbagai catatan untuk dibahas lebih lanjut dalam penyusunan RAPBN 2024. Pemerintah juga telah

menyampaikan tanggapan terhadap pandangan sembilan fraksi DPR pada Rapat Paripurna DPR tanggal 30 Mei 2023. Selanjutnya, pemerintah akan menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan KEM PPKF RAPBN 2024 kepada Badan Anggaran DPR untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi I - XI DPR bersama mitra kerjanya.

Pemerintah harus fokus dan optimis terhadap pencapaian target-target ekonomi dan fiskal tahun 2024. Guna mencapai target tersebut, pemerintah harus menetapkan strategi jangka panjang dan jangka pendek dengan mempertimbangkan pergantian kepemimpinan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni meningkatkan rasio perpajakan dan membelanjakan anggaran dengan bijak dan produktif sehingga mampu mengatasi defisit anggaran tanpa mengandalkan utang. RAPBN 2024 yang akan dijalankan pada masa transisi oleh pemerintah baru dan lama diharapkan tetap mengacu kepada prioritas nasional untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

DPR melalui Badan Anggaran perlu mendorong pemerintah untuk memerhatikan dan mengakomodir catatan yang telah diberikan sembilan fraksinya. Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR juga perlu melakukan pengawasan atas realisasi APBN Tahun 2023 sehingga memungkinkan pencapaian target RAPBN 2024. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dapat dilakukan DPR melalui rapat-rapat Komisi bersama mitra kerjanya.

Referensi

- "Arsitektur Kebijakan Fiskal 2024 Didesain untuk Percepat Transformasi yang Inklusif & Berkelanjutan", 30 Mei 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44748/t/Arsitektur+Kebijakan+Fiskal+2024+Didesain+untuk+Percepat+Transformasi+Ekonomi+yang+Inklusif+%26+Berkelanjutan>, diakses 30 Mei 2023.
- "DPR Minta Belanja Lebih Bijak pada 2024", *Kompas*, 24 Mei 2023, hal. 10.
- "F-Partai Gerindra: Pemerintah Diharap Terus Mampu Jaga Tren Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2023", 23 Mei 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44611/t/FPartai%20Gerindra:%20Pemerintah%20Diharap%20Terus%20Mampu%20Jaga%20Tren%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20di%20Tahun%202023>, diakses 24 Mei 2023.
- "F-Partai Nasdem: KEM-PPKF RAPBN 2024 Harus Menjaga Pemulihan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat", 23 Mei 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44623/t/FNASDEM%3A+KEM+PPKF+RAPBN+2024+Harus+Menjaga+Pemulihan+Ekonomi+dan+Daya+Beli+Masyarakat>, diakses 24 Mei 2023.
- "Fraksi PAN Dorong Kerangka KEM-PPKF Untuk Penguatan Transformasi Ekonomi", 24 Mei 2024, <https://daulat.co/fraksi-pan-dorong-kerangka-kem-ppkf-untuk-penguatan-transformasi-ekonomi/>, diakses 24 Mei 2024.
- "Fraksi PKB Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2024 Realistis", 23 Mei 2023, https://www.antarane.ws.com/berita/3552225/fraksi-pkb-nilai-target-pertumbuhan-ekonomi-2024-realistic?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=menu_news, diakses 24 Mei 2023.
- "KEM PPKF Disetujui DPR Sampaikan Catatan", *Media Indonesia*, 24 Mei 2023, hal. 10.
- "Tanggapi KEM dan PPKF 2024, F-Partai Golkar Tekankan Reformasi Sektor Keuangan", 23 Mei 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44607/t/Tanggapi%20KEM%20dan%20PPKF%202024,%20F-Partai%20Golkar%20Tekankan%20Reformasi%20Sektor%20Keuangan>, diakses 24 Mei 2023.
- "Target Tinggi di Tahun Transisi", *Media Indonesia*, 20 Mei 2023, hal. 10.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.